

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Affan Ghafar , 2014 ,*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* ,Jakarta, Pustaka Pelajar
- A. M. Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca - Amandemen UUD 1945* , Jakarta: Kompas.
- Charles Simabura,2011, *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya* , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dahlan Thaib,2001, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Thaib, 2002, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Dahlan thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 1999, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: Pt. rajaGrafindo Persada.
- Gde Patja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga.
- Jazim Hamidi (et.al), 2009, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2013, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Luky Sandra Amalia (et.al), 2017, *Partai Dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Assiddiqie, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, Jakarta, The Biografy Institute.

- Lubis M. Solly, 2003 *Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR kerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme).
- Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Miriam Budiarjo, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Philippus M. Hadjon, 1992, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga - Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang - Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*. Yogyakarta, Liberty.
- Sri Soematri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 2008
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Wahyudi K, Ambar W, 2010, *Reformasi aparatur negara ditinjau kembali*, Yogyakarta, Gava Media.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Y.W. Sunindhia, 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Bina Aksara.

JURNAL:

Abdullah, Abdul Gani, "Pengantar Memahami Undang-Undang". *Jurnal Legislasi*, volume 1 No. 2, September 2004.

A Ghau Kadir, "Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat", *Jurnal Politik* Vol.3.No.1, Juli 2008 .

Andi Gau Kadir, "Transparansi Legislatif dalam Lembaga Perwakilan", *Jurnal Ilmu Politik* Volume.1.NO.1, Juli 2018, September 2018.

Hantoro. Novianto M., "Struktur Kelembagaan Negara Pasca-Perubahan UUD 1945", *Jurnal Kajian* vol. 11. No. 4, Desember 2006.

Huda, Ni"matul,"Recall Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum* Volume 23, No. 3 2011.

Ibrahim, Harmailiy, Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Majelis*. 2009. Volume. 1 No.1 September 2018.

Meidi Kosandi., "Kontestasi politik dan perimbangan kekuasaan dalam perumusan dan implementasi UU MD3 2014", *Jurnal Politik* Volume.1.NO. 1, Agustus 2015 September 2018.

Novianto M Hantoro , "Kajian Yuridis Pembentukan Undang – Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol 3, NO 2, Desember 2012.

Ratnia Solihah, Siti Witianti , "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014 : Permasalahan dan Upaya Mengatasinya" , *Jurnal Hukum* Vol.2 No. 2, Oktober 2016.

Zaki Ulya,"Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem Bikameral", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 11, Nomor 2, Juli Desember 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I, II, III, IV

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

INTERNET :

Slamet Agus. 2014. PDIP dan PKB Tolak Pengesahan UU MD3. <http://www.antaraneews.com/berita/444181/pdip-dan-pkb-tolak-pengesahan-uu-md3>. diakses 20 Juli 2018

Sonny Pungus. 2011. Teori Kewenangan. <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011>. diakses tanggal 11 Juli 2018

UU MD3 Harusnya Dipecah Agar Setiap Lembaga Negara Diatur UU Tersendiri <http://www.jpnn.com/read/2012/09/05/138789/UU-MD3-HarusnyaDipecah>- diakses tanggal 20 Maret 2018

<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>